# BAB I PENDAHULUAN

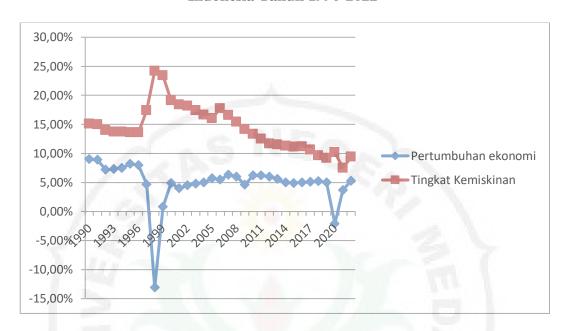
### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan bagi proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran suatu perekonomian, serta hasil dari kebijakan pembangunan yang ditetapkan, khususnya di sektor ekonomi (Novianingsih dalam Atmojo, 2018). Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang signifikan ditandai dengan pertumbuhan PDB yang tinggi, pengangguran yang rendah, dan inflasi yang terkendali. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara berupaya keras untuk menghindari dan menghilangkan aspek-aspek ekonomi yang dianggap tidak diinginkan oleh pemerintah negara tersebut dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

Menurut Mankiw (2003), pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan mendatangkan lebih banyak uang bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ekonomi yang hakikatnya merupakan proses pemanfaatan unsur-unsur produksi untuk menghasilkan keluaran (output), akan berakibat pada mengalirnya imbalan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diharapkan sejalan selaras dengan kesejahteraan hidup manusia. Kesejahteraan ini merupakan tolak ukur apakah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berkurangnya ketimpangan pendapatan dan menurunnya angka kemiskinan. Perhatikan grafik berikut ini.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 1990-2022



Ganbar 1.2 Grafik Gini Ratio Indonesia tahun 1990-2022



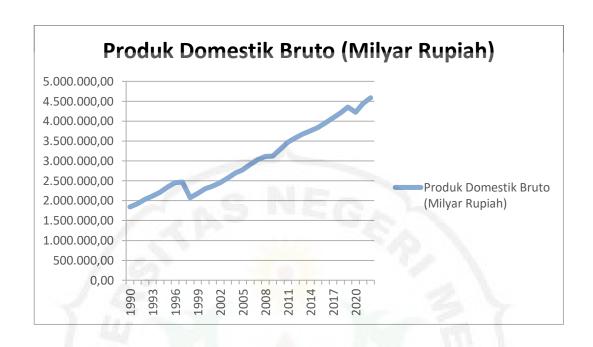
Melalui gambar grafik 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwasanya yang terjadi adalah data rasio Gini Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun 1990 hingga 2017, yang mengindikasikan peningkatan ketimpangan pendapatan selama periode tersebut. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun-tahun terakhir,

namun secara keseluruhan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Meningkatnya rasio Gini menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang sama dari ekspansi ekonomi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tidak mampu menjamin ketimpangan pendapatan tidak terjadi.

Selain itu tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 1990-2022. Meskipun terjadi penurunan signifikan dari tahun 2005 hingga 2019, namun pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Data terbaru pada tahun 2022 menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,4%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dibawah negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 2019 Indonesia berada di posisi ke enam dibawah negara Myanmar yang menempati peringkat pertama dengan pertumbuhan sebesar 7,1 %, disusul negara Vietnam 6,9 %, Laos 6,8%, Kamboja 6,5%, dan Filiphina 5,7%. Sedangkan di tahun 2020 saat seluruh negara di dunia terkena wabah Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan hingga minus 2 %. Walau pertumbuhan ini masih terbilang baik karena dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia menempati urutan ke dua di bawah Vietnam yang masih mampu bertumbuh positif 2,91%.Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui perkembangan indikator makro ekonomi Indonesia yang tertera dari grafik berikut.

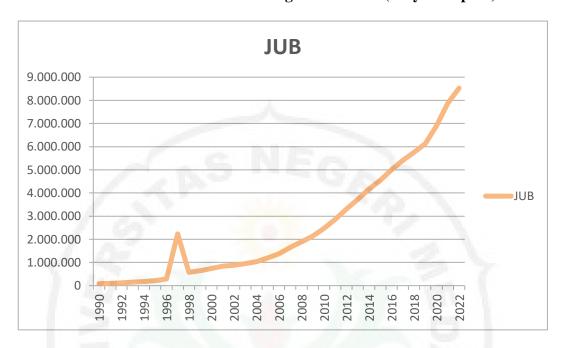
### Gambar 1.3 Grafik PDB Indonesia dalam Miliar rupiah







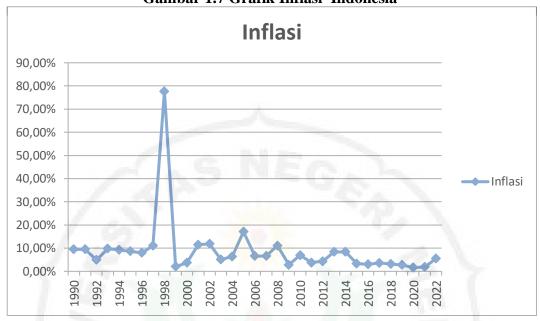
Gambar 1.5 Grafik Jumlah Uang Beredar M1 (Milyar Rupiah)



Gambar 1.6 Grafik Tren Nilai Tukar



Gambar 1.7 Grafik Inflasi Indonesia



Gambar 1.8 Grafik SBI Tahun 1990-2022





Gambar 1.9 Grafik Ekspor dan Impor Indonesia

Dari grafik di atas terlihat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh signifikan antara tahun 1990 dan 22. Sejak tahun 2000-an, PDB telah meningkat setiap tahunnya dengan tingkat rata-rata hampir 5%. Banyak penyebabnya, termasuk meningkatnya investasi pemerintah pada layanan publik dan pembangunan infrastruktur khususnya, serta meningkatnya aktivitas ekspor dan impor yang mencerminkan keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap perdagangan global, menjadi penyebab ekspansi ekonomi ini..

Selain itu, perekonomian Indonesia juga menghadapi tantangan terkait stabilitas ekonomi makro. Inflasi cukup fluktuatif selama periode tersebut, dengan beberapa periode hiperinflasi, terutama pada saat krisis ekonomi. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga bervariasi, dan mengalami depresiasi yang cukup signifikan dalam banyak kesempatan. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia termasuk suku bunga SBI untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Sebelumnya, Indonesia telah mengalami banyak krisis ekonomi, terutama Krisis Keuangan Asia tahun 1997–1998. Penurunan tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1998 pada Rp 16.000 per dolar AS, memicu krisis ini. Krisis ini memberikan negative yang sangat parah untuk Indonesia yakni PDB Indonesia mengalami kontraksi hingga - 13,1% pada 1998, tingkat inflasi mencapai angka hiperinflasi 77,6% pada 1998, tingkat kemiskinan melonjak drastis dari 17,6% pada 1996 menjadi 23,4% pada 1999, selain itu banyak perusahaan bangkrut dan pemutusan hubungan kerja massal terjadi.

Krisis keuangan global kembali terjadi di tahun 2008-2009. Dimana krisis ini juga memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, meskipun tidak seburuk krisis pada tahun 1997-1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga 4,6% pada 2009, diikuti dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan sedikit peningkatan tingkat kemiskinan.

Perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat kembali menimbulkan masalah bagi dunia pada tahun 2018. Tak ayal, perang dagang ini berdampak tidak hanya pada kedua negara yang bertikai tersebut, tetapi juga pada negaranegara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri perang dagang ini telah menyebabkan terdepresiasinya kurs rupiah.

Gubernur Bank Indonesia mengklaim bahwa meskipun pasar memperkirakan suku bunga hanya akan naik dua kali, The Fed sudah naikkan suku bunga empat kali di tahun 2018, sehingga membuat iklim ekonomi menjadi sangat tidak menguntungkan. Karena begitu banyak uang asing yang berpindah dari negarangara miskin ke AS, keadaan ini berdampak signifikan pada nilai tukar mata

uang di seluruh dunia. Prediksinya, Indonesia akan menghadapi bencana ekonomi yang mirip dengan yang terjadi pada tahun 1998 karena penurunan nilai tukar rupiah, hingga Rp 15.000 per dolar AS. Peristiwa Brexit di Eropa dan penurunan harga komoditas, yang berdampak signifikan pada negara-negara berkembang yang masih bergantung pada ekspor komoditas, merupakan dua faktor lebih lanjut yang memperburuk ekonomi global.

Pandemi COVID-19 dari tahun 2020 juga memberikan guncangan besar bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga - 2,1% pada 2020, diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan dari 9,4% pada 2019 menjadi 10,2% pada 2020. Nilai tukar Rupiah juga tertekan selama masa pandemi. Krisis-krisis ekonomi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu, diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Namun, Indonesia juga membuktikan kemampuannya untuk pulih dengan cukup cepat, terutama setelah krisis 1997-1998 dan 2008-2009.

Pada indikator makro ekonomi ekpor-impor dan inflasi terjadi fluktuasi. Hal ini bisa diketahui dari gambar grafik 1.6 walaupun pada variable inflasi di tahun 1998 inflasi sangat tinggi yakni mencapai angka 77.63% yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Sedangkan pada indikator pengeluaran pemerintah (garfik 1.1) dan jumlah uang beredar dari tahun 1990sampai tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan.

Karena keterkaitan dan integrasi ekonomi yang sangat erat, serta meningkatnya derajat volatilitas dan risiko dari unsur ekonomi dan keuangan, maka pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya didorong oleh keadaan ekonomi

global. Di sisi lain, pembangunan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menanggapi situasi tersebut. Dua kebijakan yang dapat ditempuh adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada hakikatnya, ada dua kebijakan yang dapat ditempuh. Ada empat isu yang sering dijumpai dalam bidang ekonomi makro. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut: (1) tingkat harga agregat (inflasi), (2) Produk Domestik Bruto, (3) penyerapan tenaga kerja, dan (4) neraca pembayaran (Neraca Pembayaran Indonesia/Neraca Pembayaran Nasional

Namun pada krisis tahun 2020 dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dari tambahan jumlah pengeluaran pemerintah yang diharapkan dapat menstabilkan perekonomian, nyatanya pertumbuhan ekonomi tetap anjlok sampai -2%. Hal ini menunjukkan bahwa kebiakan fiskal yang diambil pemerintah belum tepat untuk membuat ekonomi Indonesia stabil. Sedangkan dari sisi moneter Bank Indonesia juga berusaha menambah jumlah uang beredar untuk menstabilkan daya beli masyarakat. Tetapi nyatanya hamper semua pelaku usaha yang tidak mampu memberi gaji pada karyawannya sehingga banyak terjadi PHK dan menyebabkan pengangguran yang tinggi.

Model atau teori ekonomi diperlukan untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi. Tujuan dari model atau teori ekonomi adalah untuk memberikan penjelasan atas kesulitan yang dihadapi, seperti fenomena ekonomi yang dijelaskan pada gambar grafik diatas, dimana ternyata kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih tidak mampu membuat Indonesia terhindar dari resesi. Sebagai negara dengan system perekonomian terbuka kecil contoh model yang

bisa dipakai guna menganalisis kebijakan pemerintah baik dari segi fiskal maupun moneter adalah Mundell-Fleming Model.

Nanga,(2005) menyatakan bahwa: Model Mundell-Fleming, seperti yang tersirat dari namanya, diciptakan atau disajikan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming pada tahun 1962 dan merupakan adaptasi ekonomi terbuka dari model IS-LM. Kontribusi utama kedua ekonom tersebut adalah memformalkan model ekonomi makro berdasarkan kerangka kerja IS-LM Keynesian dan mencakup arus modal internasional. Kontribusi kedua ekonom ini terhadap bidang ekonomi memiliki beberapa konsekuensi penting tentang efisiensi kebijakan moneter dan fiskal dalam mencapai keseimbangan internal dan eksternal (Pardamean ,2013)

Dari penjelasn tersebut maka penelitian ini bahasannya terkait bagaimana model Mundell-Fleming akan menjelaskan kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah di masa pandemi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang, rumusan masalah pada penelitian yakni:

- Bagaimanakah proses mekanisme dan besar perubahan kebijakan dari sisi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap kegiatan makroekonomi Indonesia (pertumbuhan ekonomi )?
- 2. Bagaimana proses mekansime transmisi dan besar pengaruh perubahan kebijakan ekonomi dari sisi moneter (jumlah uang beredar) terhadap kegiatan makroekonomi Indonesia (pertumbuhan ekonomi)?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni:

- Untuk mengetahui dan menganalisis proses mekanisme dan besar perubahan kebijakan dari sisi fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap kegiatan makroekonomi Indonesia (pertumbuhan ekonomi).
- Untuk mengetahui dan menganalisis proses mekanisme dan besar perubahan kebijakan dari sisi moneter (jumlah uang beredar) terhadap kegiatan makroekonomi Indonesia (pertumbuhan ekonomi)

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

- Memberikan gambaran umum tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di analisis melalui model Mundell-Flemming.
- Bagi akademik, penelitian ini semoga bisa memperkaya ilmu serta wawasan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui analisis model Mundell-Fleming.
- 3. Bagi penulis, temuan penelitian ini semoga bisa jadi referensi untuk peneliti lain dan dikembangkan lebih lanjut.